

## Fasilitasi Modal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Bumdes Bersama: Studi Kasus Bumdes di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan

**Juliati Prihatini\*<sup>1</sup>, Arif Prabowo Wardoyo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

\*e-mail: [julie\\_pri@ipdn.ac.id](mailto:julie_pri@ipdn.ac.id)<sup>1</sup>, [31.0410@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0410@praja.ipdn.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator modal bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme fasilitasi modal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses fasilitasi tersebut, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan BUMDes Bersama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa BUMDes Bersama di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah berperan dalam beberapa mekanisme, antara lain: 1) Penyediaan bantuan modal, 2) Pendampingan dalam mengakses kebutuhan dalam mendukung BUMDes, dan 3) Fasilitasi kemitraan dengan investor. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran pemerintah, kapasitas SDM BUMDes yang belum memadai, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya penguatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam memfasilitasi modal, penyederhanaan prosedur akses modal, serta peningkatan sinergi antar stakeholder. Rekomendasi yang diajukan meliputi pengembangan skema pembiayaan inovatif, pendampingan pasca pencairan modal, serta evaluasi rutin.

**Kata Kunci:** Bumdes Bersama, Fasilitasi Modal, Pemberdayaan Ekonomi Desa

### **Abstract**

This study examines the role of the Central Java Province Community, Village, Population and Civil Registration Office as a capital facilitator for Joint Village-Owned Enterprises (BUMDes Bersama) in an effort to improve the village economy. The purpose of this study is to analyze the capital facilitation mechanism carried out by the Central Java Provincial Community Empowerment, Village, Population and Civil Registration Office, identify challenges and opportunities in the facilitation process, and evaluate its impact on the development of BUMDes Bersama. The research uses a qualitative approach with a case study method on several BUMDes Bersama in Paninggaran District, Pekalongan Regency. Data collection was carried out by in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results of the study show that the Central Java Provincial Community, Village, Population and Civil Registration Office plays a role in several mechanisms, including: 1) Provision of capital assistance, 2) Assistance in accessing needs in supporting BUMDes, and 3) Facilitation of partnerships with investors. The main challenges faced include limited government budgets, inadequate capacity of BUMDes human resources, and regulations that are not fully supportive. The conclusion of the study emphasizes the importance of strengthening the capacity of the Central Java Province Community Empowerment, Village, Population and Civil Registration Office in facilitating capital, simplifying capital access procedures, and increasing synergy between stakeholders. The recommendations submitted include the development of innovative financing schemes, post-disbursement assistance, and regular evaluations.

**Keywords:** Bumdesa Bersama, Capital Facilitation, Village Economic Empowerment

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Izzah & Fitriyadi, 2025; Oktavilia et al., 2024; Sanggu et al., 2024). Salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa adalah melalui pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). BUMDesma merupakan badan usaha yang dibentuk atas kerjasama antar desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk melalui kerjasama antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam upaya mendukung perkembangan BUMDesma, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program bantuan keuangan. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat modal, meningkatkan kapasitas pengelolaan, dan mendorong inovasi usaha BUMDesma (Fahmi & Yulianto, 2024; Indriawati & Sinnolah, 2024; Sunaryono et al., 2024).

Bantuan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama). BUMDes Bersama adalah bentuk kerja sama antar-desa dalam pengelolaan badan usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Rofi et al., 2024; Vionna et al., 2024). Bantuan keuangan bagi BUMDes Bersama dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak ketiga. Bantuan keuangan untuk BUMDesma tidak hanya bersumber dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Menurut penelitian Nugroho et al. (2021), bantuan keuangan berperan penting dalam memperkuat modal BUMDes Bersama. Hal ini memungkinkan BUMDes Bersama untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas operasionalnya. Bantuan keuangan juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan usaha (Nasution & Kurniawan, 2023; Ramadhan et al., 2024)

Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi local. Program bantuan keuangan kepada BUMDesma tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga mencakup pendampingan teknis dan manajerial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dikelola secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Melalui skema bantuan ini, diharapkan BUMDesma dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan (Putri & Niswah, 2021; Rohman et al., 2021).

Pramana et al. (2020) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan BUMDes Bersama. Mereka menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan BUMDes Bersama. Terdapat beberapa kriteria dalam pemberian bantuan keuangan, salah satunya melihat bagaimana kondisi BUMDes sebelum diberikan bantuan keuangan, jika pada suatu daerah memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesMa) maka layak untuk diberikan bantuan keuangan. Meski demikian, implementasi program bantuan keuangan untuk BUMDesma masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, hingga koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas program bantuan keuangan ini serta strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan BUMDesma di Indonesia. Hasil dari program tersebut dilaporkan oleh masing-masing desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bahwa BUMDesma sudah terbentuk dan dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Dalam program pengabdian ini, penulis melakukan perekapan data bantuan keuangan yang telah diberikan dan dikumpulkan dalam bentuk proposal-proposal penerima bantuan keuangan. Penghimpunan data dilakukan untuk input data tahun 2019 hingga tahun 2023.

## 2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa BUMDes Bersama di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus merupakan pendekatan yang mendalam untuk menyelidiki dan menganalisis fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, pengurus BUMDes Bersama, dan *stakeholder* terkait. Observasi lapangan dan analisis dokumen juga dilakukan untuk memperkaya data. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam proses fasilitasi modal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas atau nilai dari suatu program, kebijakan, atau intervensi. Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi berperan penting dalam menilai dampak dan efektivitas program pemerintah. Wibawa et al. (2019) menekankan bahwa evaluasi kebijakan publik di Indonesia harus mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan ekonomi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kerangka evaluasi adalah struktur konseptual yang memandu proses evaluasi, membantu evaluator dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil evaluasi secara komprehensif dan terstruktur.

Aspek pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dalam konteks bantuan keuangan BUMDes Bersama. Rahmawati et al. (2023) menemukan bahwa bantuan keuangan yang disertai dengan program pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BUMDes Bersama. Dalam konteks regulasi, Widiastuti et al. (2019) menganalisis kebijakan pemerintah terkait bantuan keuangan untuk BUMDes Bersama. Mereka menemukan bahwa kejelasan regulasi dan panduan teknis sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan bantuan keuangan.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam pemberian bantuan keuangan pada BUMDes Bersama, antara lain:

- a. Ketergantungan pada dana pemerintah BUMDes Bersama seringkali terlalu bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah, yang dapat menghambat kemandirian dan keberlanjutan usaha. Menurut Hidayat et al. (2020), ketergantungan ini dapat menyebabkan BUMDes Bersama kurang inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
- b. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan bantuan keuangan pada BUMDes Bersama terkadang kurang transparan dan akuntabel. Apriyanto dan Hariyanti (2022) menemukan bahwa beberapa BUMDes Bersama masih lemah dalam pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- c. Ketidakmerataan distribusi bantuan Distribusi bantuan keuangan antar BUMDes Bersama seringkali tidak merata. Penelitian oleh Susilowati et al. (2021) menunjukkan bahwa beberapa BUMDes Bersama menerima bantuan lebih besar dibandingkan yang lain, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing.
- d. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan lokal Bantuan keuangan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal. Menurut Utami dan Sukardi (2023), beberapa program bantuan keuangan tidak mempertimbangkan karakteristik dan sumber daya spesifik daerah, sehingga kurang efektif dalam mendorong perkembangan BUMDes Bersama.
- e. Kurangnya pendampingan dan pembinaan Pemberian bantuan keuangan seringkali tidak diikuti dengan pendampingan dan pembinaan yang memadai. Rahmawati et al. (2019) menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Bersama dalam mengelola bantuan keuangan agar lebih efektif dan efisien.

### 3.1. Kerangka Evaluasi

Kerangka adalah sesuatu yang menyusun atau menopang yang lain, sehingga sesuatu yang lain dapat berdiri, dan berpikir merupakan gerak akal dari satu titik ke titik yang lain sedangkan evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

#### 3.1.1. Evaluasi

Berdasarkan pada pedoman konsep Fruchey (1973:5) menjelaskan bahwa ada 4(empat) tahapan evaluasi, yaitu:

a. Pengumpulan Informasi

Pada tanggal 23 Januari 2023, penulis memulai Praktik Lapangan IV dengan bertemu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan melaporkan dan berkoordinasi bahwa praja akan melaksanakan magang dari tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah menjelaskan ada 5 (lima) bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dan beliau juga memperkenalkan praja pada setiap bidang yang sesuai dan tepat sesuai program studi praja. Tahapan ini merupakan suatu tahapan pengumpulan informasi secara akurat.

b. Penetapan Kriteria

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah menjelaskan ada 5 (lima) bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yaitu bidang Bidang I Penataan Desa, Bidang II Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang III Pengembangan dan Kerjasama Desa, Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang V Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pada tanggal 24 Januari 2024, menghadap kepada kepala bidang dan menjelaskan secara jelas terkait tugas penulis dalam Praktik Lapangan IV dan telah menentukan bidang yang sesuai dengan prodi penulis yaitu Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa. Adapun Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa yaitu melaksanakan program kerjasama desa dan mendorong pengembangan kawasan perdesaan dalam memajukan kawasan perdesaan. Pada Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa, Penulis dapat melihat secara langsung bagaimana Program Pemberian Bantuan Keuangan (BanKeu) dalam rangka mendorong dan meningkatkan BUMDesMa yang berdaya saing sehingga dapat membantu masyarakat setempat dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa. Salah satu program dalam rangka membangun dan meningkatkan potensi lokal yang dapat bersaing di Provinsi Jawa Tengah yaitu Penyerahan Bantuan Keuangan (BanKeu) kepada beberapa Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya dari BanKeu tersebut diarahkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa), yaitu gabungan dari beberapa BUMDes di kecamatan tersebut. Maka dari itu, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa sangat cocok jika dikaitkan dengan Program Studi Praja yaitu "Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat".

c. Membentuk Penilaian

Praktik Lapangan IV yang penulis lakukan dari tanggal 23 Januari – 21 Februari 2024 berdasarkan pengamatan dan pengalaman secara langsung maka penulis dapat menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sangat aktif melakukan berbagai kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menggelar Rapat Koordinasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- 2) Fasilitasi Pembangunan kawasan Pedesaan dan Bumdes Bersama di Kawasan Pedesaan Agrowisata Kecamatan Ulujami.

Tabel dan gambar merupakan bagian dari naskah dan tidak dipisah dari badan naskah. Letakkanlah tabel dan gambar di tempat yang sesuai dengan narasi sehingga mereka melengkapi narasi. Tabel dan gambar diberi nomor urut berdasarkan urutan kemunculannya pada naskah. Tabel dan gambar harus diberi judul. Nomor-nomor tersebut diikuti dengan judul tabel dan gambarnya. Setelah maupun sebelum gambar dan tabel diberikan space sebanyak 1 baris, Tampilan tabel dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 1. Rapat dalam rangka mengumpulkan informasi



(a)



(b)



(c)

Gambar 2. *Koordinasi* (a) Kepala dinas memberikan arahan terkait tugas dan fungsi (b) dan Pengarahan oleh kepala bidang (c) Penyampaian prosedur pemberian bantuan keuangan

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan Saat melaksanakan praktik lapangan IV di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu: a) Program pendampingan berupa bantuan peralatan usaha juga sudah tepat sasaran. Banyak kelompok masyarakat desa yang kini memiliki usaha produktif. b) Program administrasi kependudukan seperti e-KTP dan akta kelahiran/kematian berjalan lancar. Ini terlihat dari peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat. c) Program pembinaan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan juga menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang telah memberi dukungan dalam melakukan penelitian terhadap pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, B., & Hariyanti, D. (2022). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Bersama di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 45-58.
- Fahmi, T., & Yulianto. (2024). Penguatan Kapasitas BUMDes dan Prakarsa BUMDesma di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. *Kreativasi: Journal of Community Empowerment*, 3(2), 203–213. <https://doi.org/10.33369/KREATIVASI.V3I2.37078>
- Hidayat, R., Suharyono, & Widjaja, S. (2020). Peran bantuan keuangan dalam pengembangan BUMDes Bersama: Studi kasus di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 173-190.
- Indriawati, I., & Sinnolah, S. (2024). Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di BUMDESMA Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo. *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 466–475. <https://doi.org/10.58184/MESTAKA.V3I4.464>
- Izzah, S. N., & Fitriyadi, D. S. (2025). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Dan Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi Deskriptif di Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang). *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 2(1), 473–479. <https://doi.org/10.57235/HEMAT.V2I1.5107>
- Nasution, P. A., & Kurniawan, B. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DESA DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (STUDI KASUS BUMDESMA KAMPUNG BATIK DI DESA KLAMPAR KEC. PROPO KAB. PAMEKASAN). *Publika*, 1915–1926. <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V11N2.P1915-1926>
- Nugroho, A. D., Susilowati, I., & Handoyo, R. D. (2021). Peran bantuan keuangan dalam penguatan modal BUMDes Bersama di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, 3(1), 45-62.
- Oktavilia, S., Firmansyah, Suharno, Fafurida, Rahman, Y. A., & Adzim, F. (2024). How Creative Economy Development Plays a Role as a Driving Force in Community-Based Tourism Village Development? An Empirical Study in Central Java Province. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 5008–5018. <https://doi.org/10.62754/JOE.V3I7.4609>
- Pramana, Y., Sudarma, M., & Abdillah, Y. (2020). Implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan bantuan keuangan BUMDes Bersama. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 63-80.
- Putri, T. S., & Niswah, F. (2021). STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Publika*, 369–378. <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V9N4.P369-378>
- Rahmawati, E., Kusuma, H., & Prasetyo, Y. E. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan BUMDes Bersama: Studi kasus di Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 8(2), 112-129.
- Rahmawati, E., Susilowati, I., & Prasetyo, P. E. (2019). Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Bersama melalui pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 129-142.
- Ramadhan, R., Umaierah, S., & Afriyeni, P. (2024). Efektivitas Program Simpan Pinjam Bumdesma Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge*, 1(3), 113–122. <https://doi.org/10.22373/JIHBIZ.V2I2.8646>
- Rofi, D., Setyowati, L., Manan, A., Liftiana, R., Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, S., & Bung Tomo No, J. (2024). ANALYSIS OF RECOGNITION OF INCOME AND EXPENSES OF BUMDESMA. *International Journal of Economics, Science, and Education*, 1(2), 57–63. <https://jurnal.penajaya-pers.com/index.php/ijese/article/view/12>
- Rohman, A., Hadifi, A., Rosyidah, F., Ardiansyah, F., & Muhtadi, R. (2021). BUMDesMa KAMPUNG TANI: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS AKAD SYARIAH DI

- KABUPATEN PAMEKASAN. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 1(2), 193–224. <https://doi.org/10.36781/IQTISADIE.V1I2.171>
- Sunggu, Y. F. E., Wellem, I., & Tonce, Y. (2024). PERAN KELITBANGAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DESA BERBASIS KAJIAN DI KABUPATEN SIKKA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4165–4169. <https://doi.org/10.31004/JRPP.V7I2.26975>
- Sunaryono, Apriani, T., & Apriani, F. (2024). TRANSFORMASI BUMDESMA KONVENSIONAL KE SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PRINSIP SYARIAH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 2337–2347. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4821>
- Suriadi, A., Mahalli, K., Achmad, N., & Muda, I. (2020). The Applicative Model of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Development in North Sumatera. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1821-1832. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/20356>
- Susilowati, N., Haryanto, & Nugroho, S. B. M. (2021). Evaluasi distribusi bantuan keuangan BUMDes Bersama di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(3), 301-315.
- Utami, P., & Sukardi. (2023). Analisis kesesuaian bantuan keuangan dengan potensi ekonomi lokal pada BUMDes Bersama di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 67-82.
- Vionna, E., Fatich, L. N., Prio Pambudi, A., Tafrikhatin, A., Yuliyanto, W., & Info, A. (2024). Implementation of the Laravel Framework in Designing the BUMDESMA Kompak Sejahtera Lkd Website using the Prototype Method. *Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik)*, 8(1), 102–113. <https://doi.org/10.37339/E-KOMTEK.V8I1.1771>
- Widiastuti, H., Putra, A. H. P. K., & Utami, W. (2019). Analisis kebijakan bantuan keuangan untuk BUMDes Bersama di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 23(2), 89-104.
- Wibawa, S., Muluk, M. R. K., & Prasetyo, W. Y. (2019). Evaluasi kebijakan publik. Universitas Brawijaya Press.

## Halaman Ini Dikосongkan